

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan saat ini menghadapi tantangan yang kompleks, berupa persaingan yang semakin ketat antar industri keuangan, disrupsi teknologi yang mengharuskan industri perbankan untuk memperkuat fungsi bisnis yang sedang berjalan, serta kemampuan beradaptasi setelah berakhirnya implementasi kebijakan stimulus restrukturisasi kredit yang diberlakukan untuk menangani dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) di industri perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Siaran Pers OJK Nomor SP-41/OJK/GKPB/III/2024 tertanggal 31 Maret 2024, yang mengumumkan penghentian Stimulus Restrukturisasi Kredit Perbankan dalam kerangka Penanganan Pandemi COVID-19. Tantangan tersebut dapat menilai seberapa kuat industri perbankan dalam menghadapi dinamika perekonomian.

Institusi perbankan yang kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi akan memiliki area layanan yang terbatas dibandingkan pesaingnya seperti pinjaman online yang masif menggunakan teknologi untuk akuisisi debitur. Implikasinya, terjadi peningkatan tren kebangkrutan perbankan, dengan beberapa contoh seperti PT BPR Lubuk Raya Mandiri dan PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan. Kegagalan tersebut umumnya dipicu oleh buruknya kondisi keuangan (arus keuangan tidak sehat) dan ketidakmampuan mempertahankan daya saing dalam bisnis pembiayaan.

Tantangan yang dinamis menghasilkan regulasi yang adaptif yang menjadi katalisator bagi industri perbankan untuk terus bertransformasi dan mendorong industri perbankan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan

kualitas aset, dan mengadopsi teknologi baru sebagai pemacu bagi industri perbankan untuk dapat terus berkembang dan kuat agar dapat senantiasa beradaptasi dengan perkembangan yang ada untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu kemajuan regulasi yang signifikan untuk penguatan dan pengembangan industri jasa keuangan diwujudkan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini berfungsi sebagai payung hukum tunggal yang mengintegrasikan berbagai regulasi yang sebelumnya berdiri sendiri. Dalam perannya sebagai omnibus law di sektor keuangan, UU P2SK merupakan sebuah prakarsa dari pemerintah yang dirancang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi di sektor keuangan Indonesia (Kristiyana, 2023).

Di samping itu, UU P2SK juga dirancang untuk memperkuat peran Bank Perkonomian Rakyat (BPR) sebagai salah satu pilar industri jasa keuangan. Tujuannya adalah agar BPR dapat lebih aktif menggerakkan perekonomian dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini diwujudkan melalui perluasan kegiatan usaha yang diizinkan bagi BPR. peran BPR pasca-UU P2SK kini jauh lebih luas. BPR tidak lagi hanya berfokus pada pemberantasan rentenir atau pembiayaan usaha yang unbankable, tetapi juga dapat melakukan berbagai kegiatan usaha lainnya, sehingga kontribusinya terhadap ekonomi lokal semakin signifikan (Alamsyah, 2023). UU P2SK juga membuka peluang bagi BPR untuk lebih kuat melalui perluasan kegiatan usaha sehingga dapat memperluas

aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat (Diaz, 2023). Salah satu dampak transformatif dari pemberlakuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) adalah redefinisi hukum terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pasal 1 angka 4 dalam undang-undang tersebut mengklasifikasikan BPR sebagai lembaga perbankan yang beroperasi secara konvensional atau syariah dengan batasan spesifik, yaitu tidak menyediakan layanan dalam lalu lintas giral. Sebagai implikasi langsung dari klasifikasi baru ini, nomenklatur resmi lembaga tersebut diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Penerbitan undang-undang ini juga berjalan seiring dengan peta jalan (roadmap) pengembangan industri BPR periode 2021–2025 yang telah disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kapasitasnya sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan yang bertindak sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, OJK menetapkan empat arah pengembangan dalam roadmap tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, yang secara khusus ditempuh melalui peningkatan permodalan sebagai syarat esensial untuk memperluas kapasitas usaha BPR.

Menyadari urgensi penguatan modal ini, industri BPR telah menempuh berbagai strategi untuk memperkuat bisnis mereka. Salah satu tindakan korporasi yang menjadi opsi utama adalah penggabungan usaha atau merger. Upaya ini didukung oleh landasan regulasi yang kuat, seperti yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 14 POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR, yang menyebutkan merger sebagai salah satu strategi penguatan bisnis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 7 Tahun 2024, definisi hukum

yang lebih terperinci mengenai penggabungan dijabarkan. Berdasarkan POJK Nomor 7 Tahun 2024, penggabungan didefinisikan sebagai tindakan yuridis di mana satu BPR/BPRS atau lebih meleburkan diri ke dalam BPR/BPRS lain yang telah eksis. Proses hukum ini mengakibatkan peralihan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas dari entitas yang bergabung kepada entitas penerima. Sebagai konsekuensi akhir, status badan hukum dari BPR/BPRS yang menggabungkan diri tersebut menjadi berakhir karena hukum.

Merger bukanlah strategi penguatan bisnis yang baru di Indonesia. Di sektor perbankan, restrukturisasi melalui merger telah lama menjadi pilihan untuk memperkuat bank dalam persaingan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Nagara, 2021). Peningkatan aktivitas merger di industri perbankan saat ini tak lepas dari perubahan kondisi ekonomi global. (Syaichu, 2006) mengidentifikasi lima faktor utama yang memicu maraknya merger, yaitu: kemajuan teknologi, peningkatan kondisi keuangan, kelebihan kapasitas atau kegagalan finansial, konsolidasi pasar internasional, dan deregulasi. Lebih lanjut, (Atikah et al., 2021) menekankan bahwa aktivitas merger merupakan bagian integral dari kemajuan dan pertumbuhan industri perbankan.

Merger BPR merupakan langkah transformatif yang kian relevan dalam konteks pengembangan sektor keuangan mikro di Indonesia. Strategi konsolidasi ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan akan peningkatan skala usaha, efisiensi operasional, dan penguatan permodalan guna menghadapi tantangan persaingan dan dinamika pasar. Implementasi merger pada BPR diharapkan dapat menghasilkan entitas yang lebih kuat, stabil, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pemberdayaan ekonomi

masyarakat di tingkat lokal. Meskipun literatur spesifik mengenai dampak merger pada BPR masih berkembang, studi-studi mengenai merger di sektor perbankan yang lebih luas menawarkan wawasan berharga yang dapat menjadi acuan dalam memahami potensi implikasi pasca-merger pada BPR.

Motif utama yang melandasi keputusan merger pada sektor perbankan seringkali berakar pada upaya penciptaan nilai dan peningkatan kinerja. Di balik motif finansial dan strategis, dinamika internal entitas yang terlibat, termasuk peran kepemimpinan, turut memengaruhi proses dan hasil merger. Penelitian mengenai peran CEO yang agresif dalam merger bank menunjukkan adanya korelasi antara karakter kepemimpinan dan aktivitas pelaksanaan merger. Sebuah studi menemukan bahwa CEO yang agresif lebih mungkin mengakuisisi bank lain, mengindikasikan bahwa dalam konteks BPR, karakteristik kepemimpinan dapat menjadi faktor penentu dalam strategi dan pendekatan yang diambil selama proses konsolidasi (Ji & Jiang, 2022).

Evaluasi komprehensif terhadap kondisi dan kinerja BPR sebelum merger merupakan tahap fundamental. Analisis pra-merger ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kekuatan dan kelemahan masing-masing BPR yang akan bergabung, serta menilai kelayakan aksi korporasi yang diharapkan. Studi kasus merger dua BPR di Sumatera Barat menunjukkan pentingnya penilaian tingkat kesehatan BPR sebelum pelaksanaan merger (Nasfi et al., 2020). Selain itu Nasfi juga menyimpulkan bahwa merger merupakan salah satu alasan untuk meningkatkan kesehatan BPR agar tetap tumbuh. Penelitian dimaksud menemukan bahwa kedua BPR yang dalam kondisi sehat sebelum pelaksanaan merger memiliki modal positif untuk mencapai tujuan pasca pelaksanaan merger.

Namun, dampak merger pada kinerja BPR pasca-konsolidasi dapat bervariasi dan kompleks, dipengaruhi oleh beragam faktor internal maupun eksternal. Studi mengenai dampak merger horizontal terhadap kinerja sektor perbankan di Yordania menemukan bahwa ada peningkatan yang tidak signifikan pada rasio bank pada periode setelah merger, yang mereka kaitkan dengan kondisi ekonomi makro pada periode studi (AL-HROOT et al., 2020). Dalam konteks BPR, hal ini menekankan bahwa faktor-faktor seperti kondisi ekonomi lokal dan strategi implementasi pasca-merger akan sangat memengaruhi sejauh mana potensi manfaat merger dapat terealisasi.

Selain kinerja keuangan, dampak merger pada profil risiko bank juga menjadi perhatian penting. Studi yang menganalisis dampak merger terhadap risiko bank di Amerika Serikat menunjukkan adanya potensi peningkatan risiko jangka pendek pada bank pengakuisisi. Meskipun konteksnya adalah bank besar, temuan ini relevan bagi BPR, menyiratkan perlunya manajemen risiko yang proaktif dan adaptif dalam periode awal pasca-merger (Brealey et al., 2019).

Dampak merger juga meluas pada aspek operasional. Penelitian mengenai dampak merger dan akuisisi terhadap kinerja operasional sektor perbankan syariah memberikan perspektif relevan. Ullah et al. (2021) menganalisis dampak merger pada kinerja operasional bank syariah. Temuan mereka dapat memberikan gambaran mengenai potensi perubahan efisiensi operasional pasca-merger pada BPR syariah, meskipun detail spesifik temuan mereka perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks BPR. Peningkatan efisiensi operasional melalui eliminasi duplikasi dan optimalisasi sumber daya seringkali menjadi salah satu tujuan utama merger, dan realisasinya akan memengaruhi kinerja BPR pasca-penggabungan.

Pengalaman dari merger bank syariah milik negara di Indonesia juga memberikan pelajaran. Studi kasus merger bank syariah terbesar di Indonesia menyoroti berbagai aspek, termasuk dampak pada nasabah dan karyawan, serta implikasi terhadap stabilitas kebijakan ekonomi. Dalam studi dimaksud disebutkan bahwa merger Bank Syariah Indonesia diharapkan menjadi solusi dari lemahnya sistem ekonomi (Aldiansyah, 2021). Meskipun fokusnya pada bank syariah skala besar, harapan ini juga mendasari upaya konsolidasi BPR, yaitu untuk menciptakan entitas yang lebih kuat dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi mikro.

Namun, proses merger, terutama penggabungan tiga bank syariah di Indonesia, tidak luput dari tantangan. Ulfa (2021) menyebutkan dalam ringkasan abstraknya bahwa hasil merger memiliki dampak pada beberapa elemen seperti nasabah, pegawai, dan masyarakat. Analisis efek merger bank BUMN syariah di Bursa Efek Indonesia oleh Burhanuddin & Amran (2021) juga mencatat kekhawatiran serupa dari berbagai pihak, terutama terkait masalah akses modal bagi usaha mikro dan kecil. Kekhawatiran ini sangat relevan bagi BPR, menegaskan pentingnya merancang strategi pasca-merger yang memastikan bahwa akses pembiayaan bagi segmen UMKM tetap terjaga.

Dampak jangka panjang merger bank terhadap risiko gagal bayar juga menjadi area studi. Penelitian yang mengkaji dampak pasca krisis keuangan tahun 2008 menunjukkan bahwa akuisisi institusi yang gagal tidak meningkatkan risiko gagal bayar pengakuisisi (Cowan et al., 2022). Meskipun ini dalam konteks pasar yang berbeda, temuan ini relevan untuk mempertimbangkan bagaimana merger BPR, terutama yang melibatkan BPR bermasalah, dapat dikelola untuk menjaga stabilitas.

Analisis strategi merger dan akuisisi serta dampaknya terhadap kinerja bank di Eropa menunjukkan bahwa tingkat keterkaitan antara perusahaan yang bergabung memengaruhi kinerja operasional pasca-merger (Putri & Hariyanti, 2022). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya sinergi operasional dan integrasi yang mulus dalam mencapai peningkatan kinerja pasca-merger pada BPR. Tingkat kesamaan dalam model bisnis, sistem, dan budaya organisasi dapat memengaruhi kelancaran proses integrasi.

Dampak merger juga memiliki dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian mengenai dampak jangka pendek dan jangka panjang aktivitas merger di industri perbankan di Arab Saudi yang dilakukan oleh Alsharif (2023) bertujuan menguji secara mendalam dampak aktivitas merger pada bank-bank di sana. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa investor percaya bank pengakuisisi akan mendapatkan manfaat terbesar dari strategi merger. Memahami dampak merger pada BPR memerlukan analisis yang mencakup periode waktu yang cukup setelah penggabungan untuk menangkap efek jangka panjang pada kinerja.

Pemilihan mitra merger merupakan faktor krusial. Pendekatan berbasis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi mitra yang ideal guna mencapai efisiensi lebih baik. Studi lanjutan menginvestigasi pemilihan mitra terbaik saat menggabungkan bank-bank sektor publik di India (Aranha et al., 2024). Dalam konteks BPR, analisis data dan karakteristik BPR yang potensial merger dapat membantu dalam memilih kombinasi yang paling sinergis untuk peningkatan profitabilitas dan kinerja.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam riset merger adalah

analisis komparatif terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah aksi korporasi. Pendekatan ini, sebagai contoh, diterapkan oleh Eston et al. (2024) dalam studinya yang membandingkan kinerja keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) pada periode pra dan pasca-merger. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi adanya variasi dalam performa keuangan antara kedua periode dan menyajikan bukti empiris yang relevan terkait dampak dari merger tersebut.

Fokus pada indikator keuangan kunci, seperti kerangka CAMELS (*Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*) juga dinilai relevan dalam menilai dampak merger. Penelitian yang dilakukan oleh Nag & Prathap (2024) menganalisa dampak merger terhadap kinerja finansial Canara Bank di India dengan menggunakan teknik analisis CAMELS untuk menilai operasional, profitabilitas, dan perubahan finansial antara periode pra-merger dan pasca-merger.

Aspek profitabilitas dan kinerja keuangan berdasarkan kerangka CAMEL secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik, dengan banyak indikator keuangan (seperti pinjaman, aset, ekuitas, laba bersih, dan rasio profitabilitas kunci) menunjukkan tren yang menguntungkan. Kualitas aset, efisiensi manajemen, kualitas laba, dan posisi likuiditas juga dinilai baik. Namun, kinerja operasional bank pasca-merger dianggap kurang memuaskan, ditandai dengan tren kurang menguntungkan pada beberapa rasio operasional, meskipun kredit macet bersih terhadap total aset membaik. Meskipun kecukupan modal menunjukkan dampak negatif, penelitian menyimpulkan bahwa merger berpotensi menguntungkan dalam jangka pendek dan panjang, dengan peningkatan pada laba bersih, profitabilitas operasional, dan rasio CASA.

Merger juga sering kali dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dalam perbaikan kualitas kredit, disebabkan kualitas kredit yang baik merupakan indikator kesehatan suatu bank. Setelah merger, bank terlihat lebih proaktif dalam mengelola risiko kredit dengan upaya penagihan yang lebih intensif telah membuahkan hasil positif, tercermin dari penurunan rasio NPL sehingga menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis pasca-merger telah berhasil meningkatkan kualitas aset bank (Syaichu, 2006). Dampak lainnya akibat merger ada pada kondisi likuiditas suatu perbankan. Mengingat merger melibatkan penggabungan seluruh hak dan kewajiban bank yang terlibat, proses ini secara otomatis akan menghasilkan penggabungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari bank-bank yang melakukan merger. Konsekuensinya, likuiditas bank hasil merger akan mengalami perubahan.

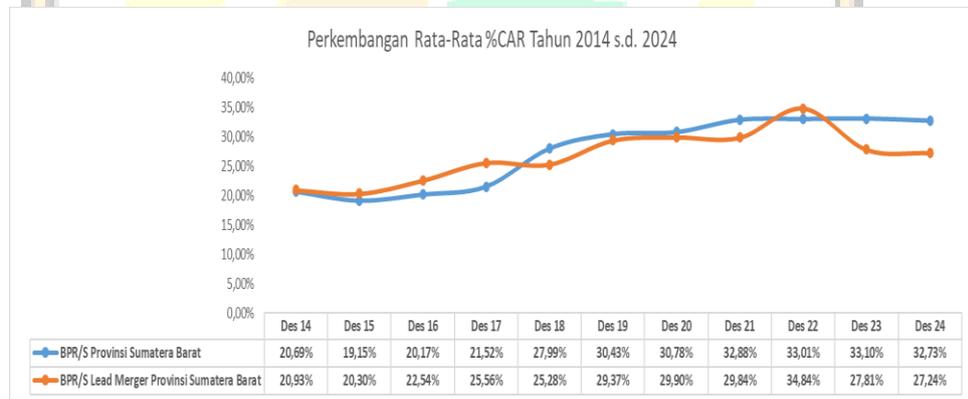
Adanya ekspansi dalam pengelolaan permodalan, kualitas aset, dan likuiditas aset pada suatu BPR menyebabkan merger dinilai merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat posisi industri perbankan. Motivasi utama merger adalah untuk mencapai efisiensi operasional, memperluas pangsa pasar, dan menggabungkan sumber daya (Syaichu, 2006). Selanjutnya keberhasilan merger sangat bergantung pada profitabilitas. Jika merger dapat meningkatkan profitabilitas bank, maka tujuan merger untuk memperkuat kondisi bisnis telah tercapai.

Pertama terkait pengelolaan permodalan. Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator fundamental yang merefleksikan kemampuan permodalan bank untuk menopang aset berisiko dan menyerap potensi kerugian. Peran krusial tidak hanya terbatas sebagai ukuran

stabilitas dan solvabilitas, tetapi juga sebagai prasyarat utama yang diamanatkan oleh regulator. OJK secara tegas mewajibkan BPR untuk memenuhi modal minimum yang disesuaikan dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dana deposan, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan keberlangsungan usaha BPR dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, OJK secara aktif mendorong strategi konsolidasi melalui merger sebagai salah satu jalan utama bagi BPR untuk memperkuat struktur permodalan mereka, sejalan dengan Program Konsolidasi Perbankan nasional.

Analisis komparatif terhadap perkembangan rata-rata CAR antara industri BPR/S di Provinsi Sumatera Barat dan 8 (delapan) BPR lead merger selama periode 2014-2024 menunjukkan dinamika yang kompleks dan menarik, sebagaimana gambar di bawah:

Gambar 1. 1 Perkembangan rata-rata CAR BPR/S Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata CAR 8 BPR lead merger Provinsi Sumatera Barat



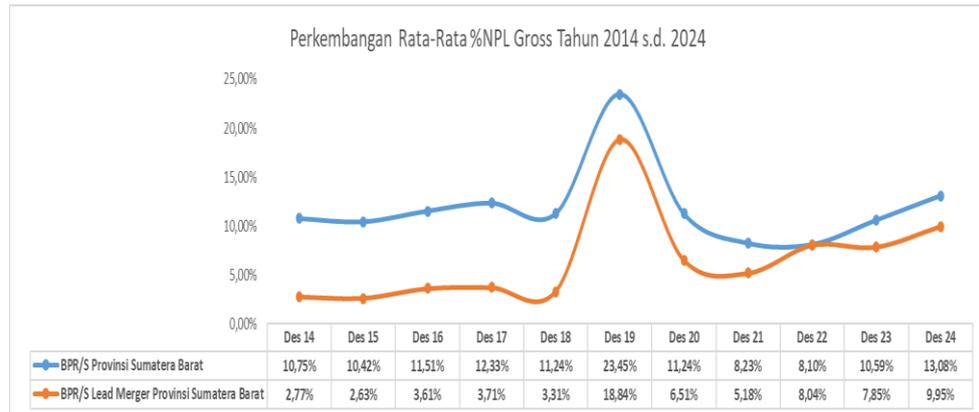
Analisis komparatif terhadap CAR menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, kelompok 8 BPR sampel secara konsisten menunjukkan posisi permodalan yang lebih optimal dibandingkan rata-rata industri BPR/BPRS di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kelompok 8 BPR sampel tersebut merupakan BPR yang sehat dan kuat secara

permodalan dan tepat untuk melakukan proses penggabungan. Meskipun terjadi lonjakan CAR sesaat pasca-merger pada tahun 2022 sebagai dampak penggabungan permodalan, terjadi penurunan pada tahun 2023 sampai dengan 2024 yang mengisyaratkan adanya perubahan strategi permodalan dari BPR pasca-merger, yaitu dengan memanfaatkan penguatan modal guna mempercepat ekspansi kredit, yang secara matematis meningkatkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan menurunkan CAR.

Selanjutnya terkait pengelolaan aspek kualitas aset merupakan salah satu pilar utama kesehatan perbankan dengan *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah adalah barometer utamanya. Rasio ini secara langsung mengukur proporsi kredit yang mengalami kesulitan pembayaran, yang menjadi ancaman nyata bagi profitabilitas bank. Tingkat NPL yang tinggi tidak hanya menggerus pendapatan bunga, tetapi juga memaksa bank untuk membentuk Cadangan Kerugian yang lebih besar, yang secara langsung mengurangi laba bersih. Regulator telah menetapkan ambang batas NPL sekitar 5% sebagai salah satu tolok ukur kesehatan bank. Secara konsisten, literatur akademis menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara NPL dan profitabilitas, yang menegaskan bahwa manajemen risiko kredit yang buruk akan berdampak langsung pada penurunan kinerja keuangan (Maryadi & Basuki, 2014).

Analisis terhadap perkembangan rata-rata NPL *Gross* di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan kelompok 8 BPR sampel dari tahun 2014 hingga 2024 menyajikan sebuah narasi yang dramatis mengenai risiko kredit di industri BPR regional.

Gambar 1. 2 Perkembangan rata-rata NPL *Gross* BPR/S Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata NPL *Gross* 8 BPR lead merger Provinsi Sumatera Barat

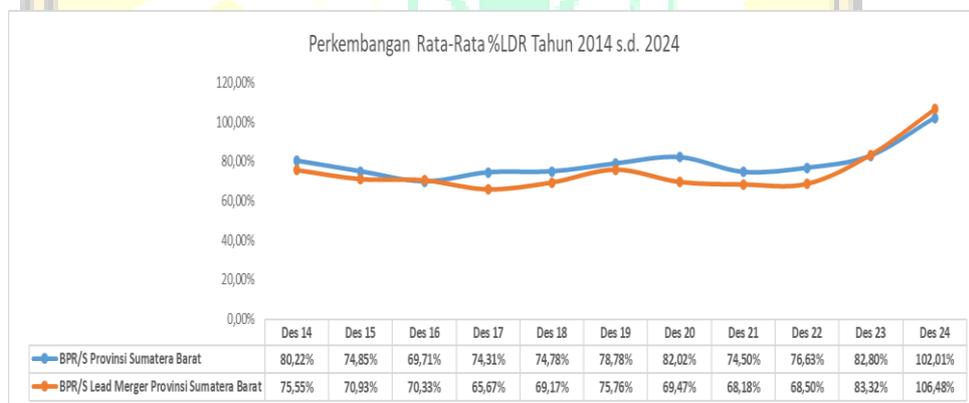


Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, kelompok 8 BPR sampel menunjukkan tingkat risiko inheren kredit yang rendah karena dapat menjaga rasio NPL di bawah *threshold* yang telah ditetapkan oleh regulator yaitu setinggi-tingginya sebesar 5%. Namun peningkatan rasio NPL pada tahun 2019 di seluruh industri BPR/BPS di Provinsi Sumatera Barat dapat diinterpretasikan sebagai sebuah *stress test* yang mengungkap kerentanan perekonomian lokal atau sektor-sektor yang dibiayai oleh BPR. Peristiwa ini memperkuat motivasi Pemegang Saham untuk mendorong merger sebagai solusi strategis, sejalan dengan *roadmap* penguatan industri BPR yang dikeluarkan oleh OJK. Berdasarkan pengamatan lebih jauh sampai dengan tahun 2024, kemampuan kelompok 8 BPR sampel untuk mengelola rasio NPL tercatat lebih terkendali dibandingkan rata-rata industri BPR/BPRS di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan adanya potensi keberhasilan dari pengelolaan risiko dari BPR pasca-merger.

Selanjutnya, fungsi intermediasi dan manajemen likuiditas yang diproksikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang merupakan pedang bermata dua dalam manajemen perbankan. Di satu sisi, rasio ini adalah indikator kunci efisiensi fungsi intermediasi, yang mengukur seberapa efektif bank menyalurkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya ke dalam bentuk kredit produktif.

Tingkat LDR yang tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan bunga dan mendorong profitabilitas. Di sisi lain, LDR juga merupakan proksi utama untuk risiko likuiditas. Tingkat LDR yang terlalu tinggi, mengindikasikan bahwa ekspansi kredit bank telah melampaui pertumbuhan dana intinya (simpanan), sehingga bank terpaksa bergantung pada sumber pendanaan non-deposito yang lebih mahal dan volatil untuk memenuhi komitmen pinjamannya. Regulator perbankan umumnya menetapkan rentang aman untuk LDR, yaitu di bawah 90%, untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan keamanan likuiditas. Analisis perkembangan rata-rata LDR di Provinsi Sumatera Barat dan pada 8 BPR sampel lead merger dari tahun 2014 hingga 2024 mengungkapkan adanya pergeseran strategi yang radikal dalam manajemen likuiditas BPR.

Gambar 1. 3 Perkembangan rata-rata LDR BPR/S Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata LDR 8 BPR lead merger Provinsi Sumatera Barat

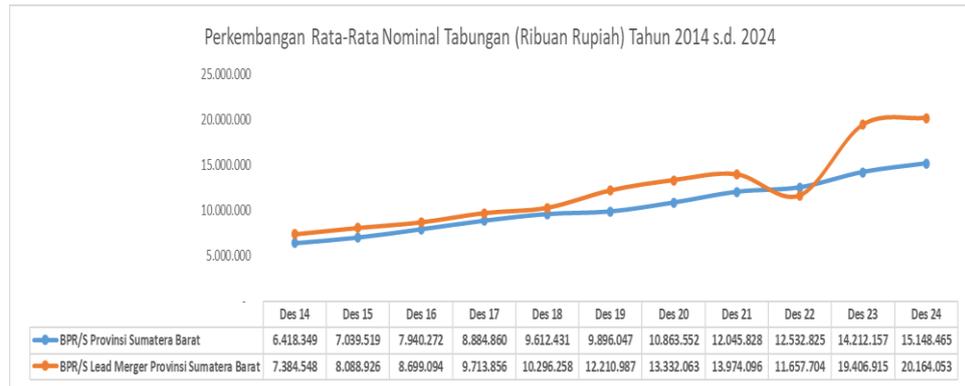


Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, baik 8 kelompok BPR sampel maupun industri BPR/BPRS secara umum dapat mengelola LDR terjaga di bawah 90%. Namun, pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, terjadi peningkatan LDR hingga melampaui 100%, terutama pada 8 kelompok BPR sampel dengan titik tertinggi mencapai 106,48%. Lonjakan ini merupakan sinyal peringatan likuiditas yang jelas dan mengindikasikan adanya perubahan strategi

intermediasi BPR pasca-merger, disebabkan dengan dorongan modal yang lebih besar, terdapat intensi bagi manajemen BPR untuk membuktikan keberhasilan aksi korporasi yang di ambil, dengan secara agresif memperluas portofolio pinjaman, meskipun harus disertai dengan peningkatan risiko likuiditas.

Kemampuan industri perbankan untuk menghimpun dana murah merupakan salah satu pendorong profitabilitas yang paling fundamental. Dana murah, yang utamanya bersumber dari tabungan, memiliki biaya bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sumber pendanaan lain seperti deposito berjangka. Oleh karena itu, basis dana murah yang besar dan stabil secara langsung akan menekan biaya dana bank dan pada akhirnya meningkatkan ROA (Singh, 2022). Lebih dari sekadar komponen biaya, besarnya Dana Pihak Ketiga, khususnya tabungan, juga merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat dan keberhasilan bank dalam membangun hubungan dengan nasabahnya. Bank yang mampu menghimpun DPK dalam jumlah besar dinilai berhasil menjalankan fungsi intermediasinya dan memiliki fondasi yang kuat untuk bertumbuh. Analisis perkembangan rata-rata saldo tabungan antara BPR/S di Provinsi Sumatera Barat dan 8 BPR sampel lead merger dari tahun 2014 hingga 2024 menunjukkan sebuah tren yang sangat positif sekaligus mengungkap adanya keunggulan kompetitif yang jelas pada kelompok sampel.

Gambar 1. 4 Pertumbuhan rata-rata tabungan BPR/S Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata tabungan 8 BPR lead merger Provinsi Sumatera Barat



Pertumbuhan rata-rata saldo tabungan menunjukkan tren positif yang konsisten, meskipun terdapat *performance gap* yang persisten dan semakin melebar antara 8 kelompok BPR sampel dan industri BPR/BPS di Provinsi Sumatera Barat. Pada awal periode, BPR sampel secara konsisten mampu menghimpun dana murah dalam jumlah yang lebih tinggi. Keunggulan kompetitif ini merupakan bukti kuat bahwa BPR sampel telah memiliki tingkat kepercayaan nasabah yang baik yang diikuti dengan strategi penghimpunan dana yang lebih efektif. Kemampuan ini dapat terus diimplementasikan dan lebih optimal pasca-merger sehingga menjadi fondasi yang stabil bagi BPR pasca-merger.

Profitabilitas sendiri merupakan indikator fundamental yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank, yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh aktivitas operasionalnya. Untuk mencapai profitabilitas maksimal, pengelolaan aset menjadi sangat krusial. Aset, sebagai sumber daya yang dikuasai bank, memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan (Annisa & Sari, 2023). Semakin tinggi nilai total aset yang dihasilkan, semakin besar pula peningkatan profitabilitas. Ini sejalan dengan temuan Eston dkk. (2024) yang menyatakan bahwa bank-bank besar cenderung menyalurkan kredit yang lebih besar, yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan dan tingkat pengembalian aset yang lebih tinggi. Secara umum, perusahaan yang memiliki aset besar

seringkali diuntungkan oleh skala ekonomi, kemampuan untuk memperluas jangkauan layanan, dan memiliki daya tawar yang lebih kuat di pasar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi perolehan laba.

Meskipun demikian, hubungan antara total aset dan profitabilitas tidak selalu menunjukkan korelasi positif yang linear, dan beberapa penelitian justru menemukan hasil yang kontradiktif. Total aset memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, menunjukkan bahwa peningkatan aset belum tentu diiringi dengan peningkatan keuntungan (Annisa & Sari, 2023). Fenomena ini dapat terjadi karena penambahan aset yang tidak diimbangi dengan manajemen aset yang efisien, peningkatan biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan aset besar, atau bahkan aset yang tidak produktif dapat menjadi beban bagi bank, mengurangi profitabilitas. Bagi BPR yang umumnya memiliki skala aset yang lebih kecil dibandingkan bank umum, optimalisasi pemanfaatan setiap aset menjadi sangat vital, terutama dalam konteks sebelum dan setelah merger di mana rasionalisasi aset menjadi kunci untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik.

Usia perusahaan menunjukkan hubungan positif dengan profitabilitas. Perusahaan yang telah beroperasi lama cenderung memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan baru (Rusmawati, 2016). Hal ini karena perusahaan yang sudah lama berdiri umumnya telah terbukti mampu bertahan dan beradaptasi dengan berbagai perubahan kondisi pasar, menandakan kekuatan dan stabilitas finansial mereka. Dengan kata lain, usia operasional suatu bank sering dianggap sebagai indikator kunci stabilitas dan kemampuannya untuk bertahan serta berkembang dalam persaingan pasar yang ketat. Usia operasional perusahaan

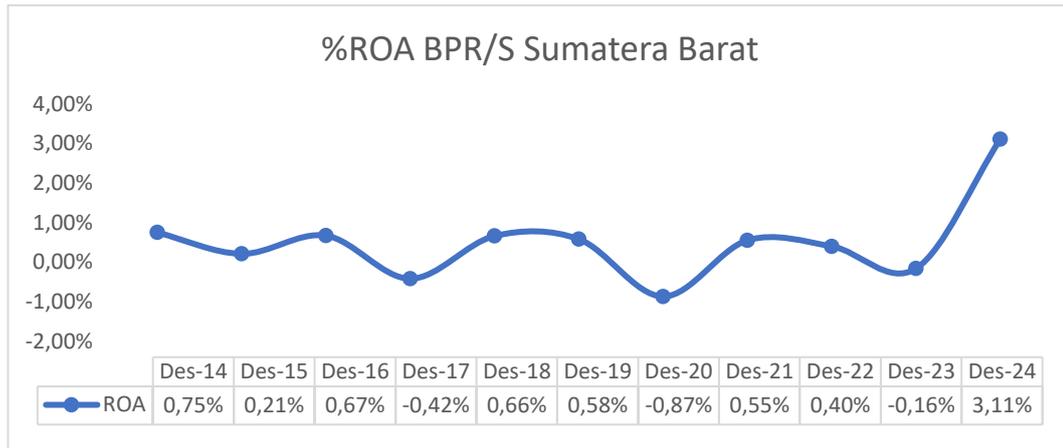
merupakan salah satu atribut krusial dalam penilaian kinerja, sebab durasi keberadaannya merefleksikan pengalaman yang telah terakumulasi dalam mengelola bisnisnya (Nurwati et al., 2014). Penelitian serupa juga dilakukan terhadap Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri yang sudah lama berdiri, dengan hasil kedua bank dimaksud memiliki tingkat profitabilitas yang baik dibandingkan bank yang baru masuk industri. Pengalaman panjang seringkali berarti bank telah membangun reputasi yang solid, basis nasabah yang loyal, dan memiliki sistem manajemen risiko yang lebih matang, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas.

Meskipun demikian, tidak semua studi berhasil menemukan adanya korelasi positif yang signifikan antara umur bank dan tingkat profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara usia dan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beragam faktor, dan bahkan terdapat kemungkinan bahwa kinerja dapat menurun seiring bertambahnya usia operasional perusahaan (Prasetya & Suwarno, 2024). Fenomena ini dapat terjadi karena bank yang lebih tua mungkin cenderung lebih birokratis, lambat dalam berinovasi, atau terjebak dengan sistem dan teknologi lama yang kurang efisien dibandingkan bank yang lebih muda dan adaptif. Selain itu, biaya pemeliharaan infrastruktur lama dan gaji karyawan senior yang lebih tinggi juga dapat menekan profitabilitas. Dalam konteks BPR yang akan melakukan merger, usia bank yang berbeda dapat membawa tantangan dan peluang. BPR yang lebih tua mungkin memiliki basis nasabah yang kuat namun kurang efisien, sementara BPR yang lebih muda mungkin lebih adaptif namun kurang memiliki pengalaman, menjadikan proses merger sebagai kesempatan untuk menggabungkan kekuatan dan mengatasi kelemahan masing-masing untuk

mencapai profitabilitas yang optimal.

Penilaian profitabilitas industri perbankan tidak lepas dari pengelolaan rasio *Return on Assets* (ROA), dimana saat ini ROA telah menjadi indikator standar dalam mengukur profitabilitas perbankan. Pernyataan ini didasari oleh sejumlah penelitian empiris yang secara konsisten menggunakan ROA sebagai variabel dependen. Sebagai ilustrasi, beberapa penelitian empiris telah menggunakan ROA sebagai variabel dependen untuk mengukur profitabilitas. Sebagai ilustrasi, beberapa penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas perbankan. Praja et al. (2023) meneliti dampak NPL, LDR, CASA, PDRB, dan Inflasi terhadap profitabilitas 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sementara itu, Dewanti et al. (2022) menganalisis pengaruh parsial dan simultan dari CAR, LDR, NPL, dan BOPO terhadap ROA pada BPR Konvensional di Surakarta periode 2015-2020. Riset serupa juga dilakukan oleh Whidastira et al. (2025) yang menguji dampak CAR, NPL, NIM, BOPO, dan LDR terhadap ROA pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian dimaksud telah mengadopsi ROA untuk menganalisis kinerja keuangan berbagai institusi perbankan. Studi-studi tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa ROA merupakan indikator yang relevan dan valid untuk mengukur efisiensi dalam mengelola aset dan menghasilkan laba dalam sektor perbankan. Selanjutnya kondisi ROA pada industri BPR/BPRS di Provinsi Sumatera Barat menjadi hal yang menarik untuk dipelajari, dengan grafik perkembangan sebagai berikut:

Gambar 1. 5 Perkembangan Rasio ROA BPR/S Provinsi Sumatera Barat



Grafik perkembangan ROA industri BPR/S di Sumatera Barat menunjukkan volatilitas yang signifikan, dengan beberapa periode kinerja negatif yang mencerminkan tantangan yang dihadapi industri BPR/BPRS. Namun, peningkatan tajam rasio ROA hingga mencapai 3,11% pada tahun 2024 mengisyaratkan potensi perbaikan kinerja di tingkat industri. Dinamika yang sangat fluktuatif disertai peningkatan di akhir periode pengamatan, menciptakan urgensi untuk melakukan penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu di balik perubahan profitabilitas, terutama dalam konteks BPR yang melakukan merger sebagai respons strategis terhadap tantangan tersebut.

Di Provinsi Sumatera Barat, praktik merger di industri BPR kini menjadi sorotan utama. Hal ini dipicu oleh Pemegang Saham BPR yang belum mengambil langkah penambahan modal secara mandiri guna memperkuat bisnis BPR dengan modal yang minim. Dengan demikian, restrukturisasi keuangan melalui merger diharapkan dapat memaksimalkan kinerja perusahaan dan menciptakan efek positif yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Perbandingan kinerja BPR sebelum dan sesudah merger menjadi indikator validitas keputusan merger. Peningkatan kinerja setelah merger menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah memberikan dampak positif bagi perusahaan,

mengindikasikan bahwa merger adalah langkah yang tepat. Sebaliknya, jika kondisi BPR memburuk pasca-merger, keputusan tersebut dinilai kurang tepat. Oleh karena itu, untuk memperkuat industri perbankan, khususnya BPR, dalam menjalankan perannya menggerakkan perekonomian mikro, analisis mendalam mengenai penggabungan dua atau lebih BPR menjadi satu entitas menjadi krusial. Selanjutnya untuk memperkuat industri perbankan, khususnya BPR dalam menjalankan perannya dalam menggerakkan perekonomian mikro, diperlukan analisis mengenai merger dua atau lebih BPR menjadi satu (Nasfi et al., 2020).

Berdasarkan analisis penulis terhadap hasil penelitian dari jurnal dan sumber terdahulu serta ketersediaan data, maka penulis menetapkan fokus penelitian ini adalah BPR di Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut karena BPR dinilai memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan bank umum dan swasta lainnya yaitu aktivitas operasional BPR yang lebih sederhana dan bersifat regional. Konteks penelitian ini menjadi relevan karena berfokus pada aksi korporasi berupa merger, yang dipandang sebagai salah satu upaya strategis untuk penguatan bisnis dalam menghadapi tantangan industri perbankan saat ini. Studi ini membedakan dirinya dari riset-riset sebelumnya dengan secara spesifik menganalisis kinerja BPR, yang memiliki karakteristik unik sehingga tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan jenis perbankan lainnya.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji dampak merger terhadap kinerja perbankan, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang justru menjadi landasan bagi urgensi penelitian ini. Pertama, dari sisi kontekstual, Sebagian besar literatur berfokus pada merger bank umum berskala besar, di mana kondisi pasar dan faktor ekonomi makro tidak dapat serta-merta diaplikasikan pada industri BPR,

memperhatikan karakteristik unik BPR dengan skala operasional mikro, fokus pada komunitas lokal, dan model bisnis yang lebih sederhana, sehingga menuntut analisis tersendiri. Kedua, dari sisi metode, penelitian sebelumnya cenderung membatasi analisis pada perbandingan kinerja akhir melalui uji komparatif tanpa melihat hubungan antar masing-masing variabel. Penelitian ini lebih lanjut akan menganalisis bagaimana hubungan antara CAR, NPL, LDR, dan perkembangan dana murah terhadap ROA bertransformasi antara periode sebelum dan setelah konsolidasi. Ketiga, dari sisi empiris, terdapat inkonsistensi hasil dalam literatur mengenai pengaruh masing-masing indikator keuangan terhadap profitabilitas BPR. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menyediakan bukti empiris yang spesifik pada konteks BPR di Provinsi Sumatera Barat, sehingga menawarkan kontribusi yang relevan baik bagi pengembangan teori kedepannya.

Dari uraian komprehensif mengenai dampak beberapa indikator keuangan terhadap profitabilitas bank yang melaksanakan aksi korporasi berupa penggabungan yang tercermin dalam literatur relevan di atas, terlihat adanya kebutuhan untuk mendalami implikasinya secara spesifik pada BPR.

Dalam kerangka analisisnya, penelitian ini menetapkan rasio ROA sebagai variabel dependen. Pemilihan indikator ini didasarkan pada statusnya sebagai rasio utama yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menilai tingkat rentabilitas BPR. Oleh karena itu, rasio ini dianggap mampu mengukur secara akurat kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pemanfaatan asetnya.

Setelah mencermati dan menelaah latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh merger pada kinerja keuangan BPR khususnya di

wilayah Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu peneliti mengambil judul “ANALISIS PENGARUH INDIKATOR KEUANGAN DAN PERKEMBANGAN DANA MURAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SEBELUM DAN SETELAH MERGER.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengaruh dari *Capital Adequacy Ratio* Bank Perekonomian Rakyat Provinsi Sumatera Barat Terhadap *Return on Asset* Sebelum dan Setelah Merger?
2. Apakah Pengaruh dari *Non Performing Loan* Bank Perekonomian Rakyat Provinsi Sumatera Barat Terhadap *Return on Asset* Sebelum dan Setelah Merger?
3. Apakah Pengaruh dari *Loan to Deposit Ratio* Bank Perekonomian Rakyat Provinsi Sumatera Barat Terhadap *Return on Asset* Sebelum dan Setelah Merger?
4. Apakah Pengaruh dari Perkembangan Dana Murah Bank Perekonomian Rakyat Provinsi Sumatera Barat Terhadap *Return on Asset* Sebelum dan Setelah Merger?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menetapkan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi apakah *capital adequacy ratio* BPR di Provinsi Sumatera Barat akan berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas

sebelum dan setelah merger.

2. Untuk mengidentifikasi apakah *non performing loan* BPR di Provinsi Sumatera Barat akan berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas sebelum dan setelah merger.
3. Untuk mengidentifikasi apakah *loan to deposit ratio* BPR di Provinsi Sumatera Barat akan berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas sebelum dan setelah merger.
4. Untuk mengidentifikasi apakah perkembangan dana murah BPR di Provinsi Sumatera Barat akan berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas sebelum dan setelah merger.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu;

- Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan teori dan konsep dalam disiplin ilmu manajemen, terutama yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas pada BPR. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan teoretis yang relevan bagi para peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan kajian mendalam mengenai topik yang sama.

- Manfaat Praktis

- i. Bagi Investor

Memberikan *insight* kepada investor terkait aksi korporasi merger yang dilakukan BPR dan dampaknya terhadap kinerja

perbankan yang tergambar dari kondisi permodalan, kondisi rentabilitas, dan penyelesaian kredit kualitas rendah.

Bagi Pengurus BPR

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengajukan proposal aksi korporasi berupa merger kepada Pemegang Saham, sebagai sebuah strategi fundamental yang bertujuan untuk memperkuat industri BPR

ii. Bagi Pemegang Saham BPR

Penelitian ini menyajikan informasi yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi terhadap BPR yang berencana untuk melakukan aksi korporasi merger.

iii. Bagi Akademisi

Studi ini dapat berfungsi sebagai bahan rujukan atau titik awal untuk penelitian lanjutan yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena merger di sektor perbankan.

iv. Bagi Peneliti

Riset ini menjadi wahana untuk mengembangkan dan mengaplikasikan metode berpikir ilmiah, yang pada akhirnya berkontribusi pada perluasan wawasan dan pengetahuan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis empiris mengenai kinerja BPR di Provinsi Sumatera Barat. Analisis ini mencakup perbandingan kinerja pada periode sebelum dan sesudah merger, yang diukur berdasarkan variabel-variabel yang telah ditetapkan dalam studi ini untuk memastikan perolehan hasil yang

akurat.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan penelitian ini diorganisasikan ke dalam lima bab utama. Masing-masing bab tersebut selanjutnya dipecah ke dalam beberapa sub-bab guna memungkinkan pembahasan yang lebih mendalam dan terfokus. Berikut adalah penjabaran ringkas mengenai isi dari setiap bab:

Bab I. Pendahuluan

Bab pertama, Pendahuluan, disajikan sebagai pengantar yang memberikan kerangka kerja menyeluruh mengenai penelitian ini. Pembahasan diawali dengan pemaparan latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya studi, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang spesifik dan terfokus. Selanjutnya, bab ini menguraikan tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian dari sudut pandang teoretis dan praktis, serta batasan ruang lingkungannya. Disajikan pula gambaran umum mengenai sistematika penulisan tesis secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif.

Bab II. Tinjauan Literatur

Dalam penelitian kuantitatif, Bab Tinjauan Literatur berperan sebagai landasan teoretis yang akan diuji melalui proses pengumpulan dan analisis data. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun bab ini meliputi pemilihan sumber yang relevan dan mutakhir, pengembangan kerangka kerja teoretis yang jelas dan konsisten dengan tujuan penelitian, serta perumusan hipotesis yang akan diuji.

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab Metodologi Penelitian merupakan perluasan dari bagian yang telah disinggung sebelumnya. Bagian ini akan menjelaskan secara rinci dan transparan mengenai desain penelitian yang digunakan, termasuk metode pengambilan sampel, ukuran sampel, serta instrumen penelitian. Selain itu, definisi operasional dari setiap variabel penelitian juga akan diuraikan secara jelas untuk mencegah salah tafsir.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan temuan-temuan penelitian yang diperoleh. Diawali dengan gambaran umum karakteristik sampel, kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara mendalam. Analisis meliputi statistik deskriptif untuk menggambarkan data dan statistik inferensial untuk menguji hipotesis, dengan hasil analisis diinterpretasikan secara mendalam secara kuantitatif. Selain itu, hasil penelitian juga dibandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk melihat kesamaan dan perbedaan. Perbedaan hasil akan dijelaskan dengan alasan yang logis.

Bab V. Penutup

Penutup berisikan simpulan yang didapat selama penelitian, beserta saran untuk perbaikan selanjutnya.